

MASIH TINGGAL DI HUNIAN SEMENTARA.

## 6 KK Korban Longsor Akan Direlokasi

**WONOSARI (KR)** - Sebanyak 6 Kepala Keluarga (KK) terdampak longsor di Dusun Blembem, Candirejo, Semin, Gunungkidul yang menyebabkan 2 orang tewas akan direlokasi.

Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nur Giyanto mengatakan untuk relokasi korban longsor di Dusun Blembem, Candirejo akan dibuatkan rumah baru mulai Oktober 2023. "Lokasi untuk rumah tinggal yang diharapkan aman dari bencana long-

sor sudah disiapkan berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi hunian lama," katanya Kamis (13/9).

Terkait dengan program relokasi tersebut, saat ini sedang dilakukan sosialisasi ke warga, juga penyediaan lahan untuk pembangunan rumah baru. Sedangkan relokasi tersebut dilaksanakan dengan program bantuan sosial. Se-

tiap keluarga mendapatkan alokasi pembangunan sebesar rumah sebesar Rp 50 juta. Diharapkan pembangunan rumah baru bagi ke 6 KK terdampak longsor tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Tempat relokasi berjarak satu kilometer dari lokasi longsor dan masih berada di Dusun Blembem.

"Prosesnya sudah ditangani pihak kalurahan dan sekarang proses sertifikasi kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional," imbuhnya.

Ditambahkan Jagabaya

Kalurahan Candirejo, Semin, Gunungkidul Sri Hartono ke enam keluarga terdampak longsor di Dusun Blembem saat ini masih mengungsi tempat tinggal sementara di bekas SD yang tak terpakai. Pihaknya berharap permasalahan relokasi bisa selesai sesuai dengan permintaan warga terdampak. Selain agar segera memiliki tempat tinggal yang aman, saat ini menghadapi musim penghujan Rumah hunian mereka yang lama berada di kawasan rawan bencana.

(Bmp)

TERKAIT SANKSI PEMECATAN ASN

## DPRD Desak Bupati Patuhi Putusan Banding BPASN

**WONOSARI (KR)** - Mantan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul berinisial HI melakukan audiensi dengan DPRD dan meminta agar bupati patuh hasil putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Dalam putusan banding BPASN merekomendasikan untuk pemeringan jabatan yang dijatuhkan kepada HI dengan hukuman pembebasan jabatan selama dua belas bulan. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan bupati, HI diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada tanggal 1 Juli 2023 lalu lantaran tersandung kasus perselingkuhan. "Putusan banding ini wajib dipatuhi semua pihak," kata Wakil Ketua DPRD Suharno SE, Kamis (13/9).

Menurut Suharno, sanksi pemberhentian yang diberikan oleh bupati tersebut belum melalui tahap-

an yang tertuang dalam aturan. Ketika akan memberhentikan HI sebagai ASN perlu dilakukan sejumlah tahapan mulai dari administratif, mediasi, hingga putusan dan hal ini tidak dilakukan dan langsung divonis pemberhentian. Sebelum melakukan audiensi HI mengajukan keberatan ke BPASN atas pemberhentiannya tersebut.

Dari putusan BPASN ternyata merekomendasikan untuk pemeringan hukuman yang dijatuhkan kepada HI dengan hukuman pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama dua belas bulan. Sesuai diatur dalam aturan, hukuman disiplin berat itu pertama menurunkan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, kemudian pembebasan dari jabatan selama 12 bulan dan terakhir pemberhentian dengan hormat atas tidak kehendak sendiri.

"Ada tahapan sanksi yang wajib dipatuhi dan tidak langsung dengan vonis," ujarnya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih SE menambahkan HI memang sempat mengajukan banding ke BPASN terkait putusan pemberhentian dirinya oleh Bupati Gunungkidul. Banding tersebut dinyatakan diterima dan BPASN merekomendasikan agar yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman pemberhentian.

Keputusan BPASN tersebut wajib dilaksanakan semua pihak. Dalam aturan juga ditulis bahwa bupati dapat dikenai sanksi administrasi manakala tidak mengindahkan rekomendasi BPASN tersebut.

"Maka kami meminta agar bupati mengikuti aturan dalam pemberhentian pegawai, termasuk mengikuti rekomendasi BPASN," ujarnya. (Bmp)

KERUSAKAN JALAN BANYUMENENG KIDUL - BANYUROTO

## DLH Instruksikan Perusahaan Tambang Rutin Penyiraman Jalan

**WATES (KR)** - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo telah menginstruksikan perusahaan tambang PT Rahadi Suar Sinergi yang armada pengangkut hasil tambang mereka biasa melintasi ruas jalan Banyumeneng Kidul - Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kulonprogo untuk rutin melakukan penyiraman jalan sebagai solusi jangka pendek.

Langkah tersebut sangat diperlukan guna mencegah sebaran debu akibat rusaknya jalan yang mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di SD N 2 Wonorejo, Banyuroto, Nanggulan.

Instruksi disampaikan Kepala DLH setempat, Sumarsana saat audiensi tertutup yang diikuti perwakilan SD N 2 Wonorejo, Lurah Banyuroto Sudalja, Panewu Nanggulan Harayoto MMA, perwakilan PT

Rahadi Suar Sinergi dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (14/9).

"Kami sudah koordinasi dengan para pihak yang memakai jalan depan SD tersebut, tentu dalam jangka pendek debu harus diatasi. Kami mengharapkan para pihak yang memakai jalan tersebut yaitu perusahaan crusher, atau proyek yang ada di Banyuroto dan lewat ruas jalan tersebut gotong royong menyimpan jalan sampai musim hujan tiba," tegas Sumarsana.

Penyiraman jalan juga menjadi tanggung jawab pelaksana TPA Banyuroto. Mengingat jalur pengirim sampah menuju TPA melintasi jalan Banyumeneng Kidul - Banyuroto. "Jadi semua pihak terkait ikut bertanggungjawab," jelasnya.



KR-Asrul Sani

Akibat banyaknya debu yang ditimbulkan jalan rusak, para siswa SDN 2 Wonorejo selalu memakai masker.

"Penyiraman jalan solusi jangka pendek agar KBM di SD N 2 Wonorejo, Kelompok Bermain Citra Bangsa dan aktivitas warga sekitar tidak terganggu paparan debu," ujar Sumarsana menambahkan untuk solusi jangka panjang akan dilakukan perbaikan jalan oleh DPUPKP Kulonprogo.

Guru SD N 2 Wonorejo, Bardal Dersonolo mengatakan, audiensi belum menemui kesepakatan tentang kapan jalan Banyumeneng

Kidul - Banyuroto diperbaiki. Dalam pertemuan, pemerintah minta perbaikan jalan dilakukan perusahaan tambang, tapi perusahaan tambang tidak bisa menyanggupinya. "Pihak dari tambang keberatan karena biaya perbaikan besar. Kalau menggunakan aspal dibutuhkan anggaran sekitar Rp 400 juta, sedangkan pakai beton bisa miliaran. Kalau perbaikan dilakukan pemerintah baru akan diajukan 2024 atau 2025," tutur Bardal. (Rul)

RAPERDA PSU PERUMAHAN

## Pengembang Belum Penuhi Kewajiban



KR-Widiastuti

Rapor Penyerahan Raperda tentang Penyerahan dan Pengelolaan PSU Umum Perumahan.

**PENGASIH (KR)** - Para pengembang di wilayah Kabupaten Kulonprogo secara aktual belum memenuhi kewajiban mereka dalam mewujudkan perumahan yang layak dan sehat bagi konsumen perumahan Kabupaten Kulonprogo. Sehingga para pengembang tidak mengindahkan tentang kewajiban untuk penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan kepada pemerintah, karena belum adanya payung hukum di Kulonprogo yang mengatur tentang hal tersebut.

"Dengan adanya celah hukum itu para pengembang tidak bertanggung jawab sepenuhnya dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang baik. Pihak pemerintah juga masih kesulitan untuk mengintervensi baik secara administratif atau bentuk sanksi lainnya kepada para pengembang," kata Hamam Cahyadi ST Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dalam Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang Penyerahan dan Pengelolaan PSU Umum Perumahan, di Ruang Kresna Gedung DPRD Kulonprogo, Kamis (14/9).

Permasalahan selanjutnya, ungkap Hamam, adalah kecurangan developer, sebagaimana yang biasa terjadi di daerah lain, bahwa pihak developer tidak konsisten pada rencana yang tercantum pada site plan, yaitu terjadinya pengalihan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Per-

mahan yang dijual ke pihak ketiga atau dialihfungsikan sebagai bangunan yang memiliki nilai komersial. Dengan demikian konsumen perumahan lebih banyak dirugikan karena kondisi lingkungan perumahan yang tidak nyaman.

Pemmasalahan selanjutnya adalah pengembangan tidak membangun fasilitas pemakaman. Para pengembang hanya melakukan perjanjian dengan desa/kalurahan terdekat, dengan memberikan kompensasi pada desa/kalurahan, terkait pemakaman untuk warga perumahan. Kewajiban pengembangan perumahan untuk menyediakan tempat pemakaman sebenarnya telah diatur dalam Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian masalah pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, juga harus segera ditangani.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulonprogo, Pengembang Perumahan di Kulonprogo terdapat 29 lokasi perumahan dan 3 unit Rusunawa.

Perumahan tersebut tersebar di 5 kapanewon, yaitu Kapanewon Wates, Pengasih, Sentolo, Panjatan, dan Nanggulan, sedangkan Rusunawa terdapat di Kapanewon Wates 2 lokasi dan Kapanewon Sentolo 1 lokasi. Melihat kemajuan pembangunan dan perkembangan dan dinamika penduduk di Kulonprogo, dimungkinkan jumlah tersebut akan semakin bertambah. (Wid)

18 PENEWU GUNUNGKIDUL

## Tandatangani Perjanjian Pemanfaatan Data Kependudukan

**WONOSARI (KR)** - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan seluruh Kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul Kamis (14/9) kemarin.

Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan seluruh Panewu.

"Perjanjian ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat sistem administrasi kependudukan, akurasi data kependudukan, dan meningkatkan layanan publik," kata Kadisdukcapil Markus Trimunarja, SIP MSi Kamis (14/9).

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri, untuk seluruh kapanewon agar dapat menggunakan data kependudukan. Hal ini dimaksudkan untuk seluruh kapanewon dapat melakukan verifikasi data penerima bantuan dan pelayanan publik di lingkup ka-

panewon agar pengelolaan data mendapat perlindungan.

Untuk Kabupaten Gunungkidul ada 10 Perangkat Daerah yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan dukcapil terkait pemanfaatan data kependudukan tersebut.

"Saat ini kalurahan yang telah melakukan perjanjian kerjasama dalam pelayanan administrasi kependudukan sebanyak 115 kalurahan" imbuhnya.

Bupati Gunungkidul H. Sunaryanta dalam arahnya menyampaikan agar data kependudukan dikelola dengan hati-hati serta dijaga kerahasiaannya. Supaya data tersebut tidak jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kepada sekeruh panewu agar dapat menjaga memastikan keamanan dan kerahasiaan data kependudukan, karena di era digital seperti sekarang ini peretasan dapat terjadi sewaktu-waktu.

"Kami berharap ada perhatian, juga agar ada SDM untuk pengelolanya", ujarnya. (Bmp)

BANGKITKAN EKONOMI MASYARAKAT

## 40 Kalurahan Gelar Potensi Rintisan Budaya



KR-Dedy EW

Peninjauan stand UMKM di Kalurahan Planjan.

**WONOSARI (KR)** - Sebanyak 40 kalurahan di Gunungkidul menggelar potensi rintisan kalurahan budaya Gunungkidul 2023 mulai, Kamis (14/9) hingga Sabtu (23/9). Pelaksanaan gelar potensi tersebut dilaksanakan di masing-masing kalurahan. Sehingga program yang digelar Dinas Kebudayaan (Disbud) Gunungkidul ini mampu membangkitkan ekonomi masyarakat.

Gelar potensi ini dalam rangka akreditasi kalurahan rintisan budaya. Sehingga nantinya bisa menjadi indikator meningkatkan status kalurahan dari rintisan menjadi kalurahan budaya," kata Kepala Disbud Gunungkidul Agus Mantara MM di dampingi

Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni (Atlas) Dwi Prihadiani di sela-sela acara Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Planjan, Saptosari, Kamis (14/9).

Kedatangan rombongan disambut Lurah Planjan Muryono Asih Sulistyono dan pamong kalurahan. Dalam kesempatan tersebut ditampilkan tradisi ransulan, karawitan, serta pameran usaha mikro kecil menengah. Acara ini juga bersamaan dengan Hari Jadi ke 101 Kalurahan Planjan.

Diungkapkan, gelar potensi kalurahan rintisan budaya tidak dipusatkan di kabupaten, namun di masing-masing kalurahan. Selain dimaksudkan

untuk memaksimalkan penampilan gelar potensi budaya, juga diharapkan berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Untuk penilaian di antaranya aspek seni, Bahasa, adat tradisi, tata ruang, arsitektur, permainan tradisional dan tata kelola pemerintahan kalurahan," imbuhnya, Lurah Planjan Muryono menambahkan, gelar potensi menampilkan seni, budaya, adat tradisi termasuk UMKM.

Kalurahan lain yang menyelenggarakan gelar potensi rintisan budaya di antaranya, Jetis, Karangduwet, Karangasem, Bohol, Nglindur, Melikan dan Semugih. Juga kalurahan Ngleri, Banaran, Gading, Logandeng, Nglangeran, Tegalarjo, Sambirejo, Rejosari, Pengkol, Kedungpoh, Kedungkeris, Baleharjo. Serta kalurahan Pundungsari, Bendung, Jatiayu, Gedangrejo, Bedoyo, Sidoarjo, Genjahan, Karangmojo, Sidoharjo, Sumberwungu, Candirejo, Ngeposari. Juga di Tepus, Ngestirejo, Kemiri, Gari, Giricahyo, Giritirto, Girmulyo dan Piyaman. (Ded)

PESERTA RAKERNIS BAHARKAM POLRI

## Kunjungi Omah Jaga Warga Banguncipto

**WATES (KR)** - Peserta rakernis Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri mengunjungi kelompok jaga warga dan omah jaga warga di Kalurahan Banguncipto Sentolo, Rabu (13/9) malam. Kunjungan perwakilan direktur-direktur 34 Polda di bawah naungan Baharkam Polri ini dipimpin Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri SH SIK.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Polair Korpolaairud Baharkam Polri Brigjen Pol Mohammad Yassin Kosasih SIK MSi, Brigjen Pol Dody Marsidy MHum, Anjak utama bidang Sabhara Baharkam Polri dan tim dari Baharkam Polri, beberapa pendamping dari PJU Polda DIY, Wakapolres Kulonprogo Kumpul Riko Sanjaya SH SIK mewakili Kapolres Kulonprogo, Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti



KR-Istimewa

Kunjungan peserta rakernis Baharkam Polri ke omah jaga warga Banguncipto Sentolo.

Indrayanti ST MT, Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati SE, Dandim 0731 Kulonprogo Letkol Arh Viki Herwandi SSos, Lurah Banguncipto Boiran SPd SH MA, pamong Kelurahan Banguncipto dan Polisi RW Banguncipto.

Lurah Banguncipto, Bapak Boiran SPd SH MA menyampaikan, salah satu amanah dari Undang-Undang Keistimewaan dengan membentuk sebuah

kelembagaan di tingkat kabupaten, yakni jaga warga untuk memperkuat dan melakukan kolaborasi serta koordinasi.

"Program pemerintah selalu dimusyawahkan Kalurahan Banguncipto bersama semua lembaga termasuk omah jaga warga dan kelompok satu warga. Dalam mendukung program pemerintah sampai masalah sosial dan masalah yang mengganggu kamtib-

mas serta kesejahteraan warga," jelasnya.

Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri SH SIK mengatakan, rakernis Baharkam Polri ini tentang Polisi RW dan Jaga warga. Dalam kunjungan ini satu hal yang dianggap luar biasa sudah diterbitkannya Pergub nomor 59 tahun 2022 tentang jaga warga. Jika memungkinkan dapat di ATM (amati, tiru dan modifikasi), disesuaikan dengan budaya lokal masing-masing

"Jaga warga sudah bisa mengidentifikasi masalah dan mencari solusi pemecahan masalah konflik sosial walaupun dengan skala kecil. Mari kita bersatu padu melakukan pembangunan, kalau pembangunan lancar ekonomi akan tumbuh dan impactnya masyarakat akan sejahtera," kata Brigjen Pol Suhendri. (Dan)